

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN DI WILAYAH CIANJUR SELATAN

Piki Rohmatuloh¹, Ikhwan Aulia Fatahillah²
pikirohmatuloh73@gmail.com¹, ikhwanaf@uinsgd.ac.id²
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrak: Pencemaran lingkungan merupakan isu global yang kritis dengan dampak yang parah pada ekosistem dan kehidupan manusia, khususnya di Indonesia. Studi ini berfokus pada tantangan lingkungan yang mendesak di Cianjur Selatan, wilayah yang kaya akan sumber daya alam tetapi menghadapi pengawasan yang tidak memadai. Masalah penelitian berpusat pada efektivitas penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan di Cianjur Selatan, di mana berbagai bentuk pencemaran mengancam kesehatan masyarakat dan ekosistem lokal. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi peraturan saat ini, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya, dan merekomendasikan strategi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan lembaga penegak hukum, pejabat pemerintah daerah, perwakilan industri, dan anggota masyarakat yang terkena dampak pencemaran. Temuan penelitian mengungkapkan tantangan yang signifikan, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan, kurangnya sumber daya dan personel yang kompeten dalam lembaga penegak hukum, dan koordinasi antar lembaga yang lemah. Studi ini menyoroti peran penting keterlibatan masyarakat dan perlunya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan penegakan peraturan lingkungan. Rekomendasi meliputi peningkatan pendidikan publik, peningkatan pendanaan untuk lembaga penegak hukum, dan pemanfaatan teknologi untuk pemantauan kondisi lingkungan secara real-time. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika penegakan hukum lingkungan di Cianjur Selatan dan mengusulkan model yang melibatkan masyarakat untuk pengelolaan polusi yang lebih efektif.

Kata Kunci: Pencemaran Lingkungan, Penegakan Hukum, Cianjur Selatan, Kesadaran Publik, Penelitian Kualitatif, Keterlibatan Masyarakat.

Abstract: Environmental pollution is a critical global issue with severe impacts on ecosystems and human life, especially in Indonesia. This study focuses on pressing environmental challenges in South Cianjur, a region rich in natural resources but facing inadequate monitoring. The research problem centers on the effectiveness of law enforcement against environmental pollution in South Cianjur, where various forms of pollution threaten public health and the local ecosystem. The goal is to evaluate current regulations, identify factors influencing their implementation, and recommend strategies to improve law enforcement effectiveness. Using a qualitative descriptive-analytical approach, data was collected through in-depth interviews with law enforcement agencies, local government officials, industry representatives, and community members affected by pollution. Research findings reveal significant challenges, including low public awareness of environmental issues, a lack of resources and competent personnel within law enforcement agencies, and weak inter-agency coordination. This study highlights the important role of community engagement and the need for stronger collaboration between government, industry and civil society to improve enforcement of environmental regulations. Recommendations include improving public education, increasing funding for law enforcement agencies, and utilizing technology for real-time monitoring of environmental conditions. This research contributes to a deeper understanding of the dynamics of environmental law enforcement in South Cianjur and proposes a model that involves the community for more effective pollution management.

Keywords: Environmental Pollution, Law Enforcement, South Cianjur, Public Awareness, Qualitative Research, Community Involvement.

PENDAHULUAN

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu isu global yang memiliki dampak serius terhadap ekosistem dan kehidupan manusia. Di Indonesia, permasalahan ini semakin mendesak, terutama di wilayah yang kaya akan sumber daya alam namun memiliki pengawasan yang kurang optimal, seperti di Cianjur Selatan. Wilayah ini dikenal dengan kekayaan alamnya, terutama sektor pertanian dan perikanan, yang sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang bersih dan sehat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus pencemaran lingkungan mulai mencuat, baik dari limbah industri, pertambangan, maupun aktivitas manusia lainnya.

Pencemaran lingkungan yang terjadi tidak lain seperti kondisi lingkungan (tanah, udara, dan air) berubah dengan cara yang tidak menguntungkan (merusak dan merugikan manusia, hewan, dan tumbuhan) karena adanya benda-benda asing (seperti sampah, limbah industri, minyak, logam berbahaya) yang disebabkan oleh perbuatan manusia, yang menyebabkan lingkungan tidak berfungsi seperti semula. Limbah dan polusi lingkungan terikat erat. Dua faktor yang menyebabkan masalah limbah adalah penurunan daya dukung alam sebagai tempat pembuangan limbah dan kesinambungan antara produksi limbah dan pengolahannya. Limbah terus meningkat dengan laju yang cukup cepat. Di sisi lain, kapasitas pengolahan limbah masih kurang. Tanah melakukan fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hampir seluruh aktivitas manusia dilakukan di tanah, mulai dari tempat tinggal, pertanian, industri, dan aktivitas lainnya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di Indonesia sudah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, implementasinya sering kali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, lemahnya koordinasi antar lembaga, hingga adanya pengaruh dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya pelanggaran yang berulang dan kurangnya efek jera bagi pelaku pencemaran lingkungan.

Di Cianjur Selatan, permasalahan ini menjadi lebih kompleks dengan adanya keragaman bentuk pencemaran, seperti pencemaran air, tanah, dan udara, yang semuanya berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan kelangsungan ekosistem setempat. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum di wilayah tersebut. Apakah regulasi yang ada sudah cukup efektif untuk menangani kasus-kasus pencemaran? Bagaimana peran aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada? Dan sejauh mana masyarakat terlibat dalam pengawasan dan pelaporan kasus pencemaran?

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia menahan berbagai tantangan yang signifikan. Nugroho dkk mengungkapkan bahwa masih banyak kendala dalam penerapan hukum lingkungan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang dilatih dan infrastruktur yang memadai di wilayah industri, sehingga pelanggaran hukum sering kali tidak ditindaklanjuti dengan sanksi yang sesuai. Selain itu, Widiyanto menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan, menemukan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelaporan transmisi menghambat keterlibatan mereka, dan ketakutan akan intimidasi dari pihak-pihak yang berpengaruh juga menjadi faktor penghalang. Prabowo dan Astuti menciptakan terobosan yang ada, menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan, yang mengakibatkan efektivitas penegakan hukum menjadi lemah. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan, perlu dilakukan yang lebih komprehensif yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam menjaga lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di Cianjur Selatan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi

implementasi regulasi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum demi menjaga kelestarian lingkungan di wilayah tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di wilayah Cianjur Selatan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, termasuk peran berbagai aktor dan kendala yang dihadapi di lapangan. Lokasi Penelitian dilakukan di wilayah Cianjur Selatan, Jawa Barat, yang meliputi beberapa kecamatan yang mengalami tingkat pencemaran lingkungan yang signifikan, seperti kecamatan Agrabinta, Sindangbarang dan wilayah-wilayah yang lain. Wilayah ini dipilih karena potensi pencemaran dari sektor industri, dan aktivitas pertanian yang tinggi. Sumber Data Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu: Data Primer: Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam penegakan hukum dan pengelolaan lingkungan, antara lain: Aparat penegak hukum yang menangani kasus pencemaran lingkungan, Pejabat Dinas Lingkungan Hidup setempat, Pelaku industri atau usaha yang terlibat dalam aktivitas yang berpotensi mencemari lingkungan, Tokoh masyarakat dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang aktif di bidang lingkungan, Masyarakat lokal yang terdampak polusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian terkait efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di Cianjur Selatan menemukan beberapa temuan penting. Tingkat kesadaran masyarakat yang sangat rendah tentang betapa pentingnya perlindungan lingkungan hidup menjadi salah satu masalah utama. Sebagian besar masyarakat masih belum menyadari dampak jangka panjang pencemaran terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Karena limbah rumah tangga dan industri dibuang begitu saja, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada pendidikan tentang lingkungan hidup. Selain itu, penegakan hukum juga terhambat oleh keterbatasan sumber daya. Aparat penegak hukum dan Dinas Lingkungan Hidup setempat tidak memiliki staf dan alat yang mumpuni untuk melakukan pemantauan dan analisis pencemaran. Terkadang, pihak-pihak yang berkepentingan ekonomi juga menjadi penghambat proses penegakan hukum di wilayah pengaruhnya, terutama dalam situasi di mana industri pencemar sangat erat kaitannya dengan elit politik daerah.

Permasalahan lainnya adalah lemahnya koordinasi antar lembaga terkait, di mana lembaga seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kepolisian seringkali bekerja sendiri-sendiri dan tidak bersinergi dengan baik sehingga menghambat proses penanganan kasus pencemaran. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus pencemaran masih minim karena minimnya pengetahuan tentang tata cara pelaporan dan rasa takut diintimidasi oleh pihak-pihak yang berpengaruh. Peran LSM dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan pencemaran sangatlah besar. Namun, dukungan terhadap LSM tersebut masih sangat minim, baik dari segi regulasi maupun dukungan dana. Hal ini menyebabkan peran LSM belum optimal. Regulasi yang mengatur tentang pencemaran lingkungan telah ada, namun penerapan sanksi terhadap pelanggar masih kurang tegas dan belum memberikan efek jera bagi pelaku pencemaran.

Selain itu, fasilitas pengelolaan limbah di Cianjur Selatan pun sangat terbatas. Lebih spesifik lagi, fasilitas pengelolaan limbah industri hampir tidak pernah ada di sana. Beberapa perusahaan industri rutin membuang limbah mereka langsung ke sungai atau tanah, tanpa melalui proses pengolahan yang tepat. Kondisi tersebut sangat merusak kesehatan masyarakat setempat, yang secara rutin menderita penyakit tertentu, seperti masalah pernapasan atau kulit. Hal itu juga sangat merugikan mata pencahariannya, terutama yang bergantung pada pertanian atau perikanan. Kaki penjagaan lingkungan di wilayah ini pun secara signifikan tak cukup efektif, karena kurangnya

anggaran atau sumber daya manusia. Sedikit penjagaan rutin berarti bahwa kondisi pencemaran sama sekali tidak adanya peningkatan. Karena itu, reformasi tegas peraturan dilakukan, termasuk peningkatan baku mutu limbah dan sanksi yang lebih keras kepada pelanggarnya.

Satu cara yang bisa dicoba adalah kerja sama yang lebih baik antara pemerintah, orang-orang, bisnis, dan kelompok sosial. Saat ini, kerjasama di antara mereka masih terpisah; jadi menangani pencemaran tidak berjalan dengan baik. Dengan kerja sama yang lebih bagus, diharapkan peran setiap pihak bisa lebih jelas dan tindakan terhadap pencemaran alam bisa lebih cepat diambil. Penelitian ini juga memberi hal baru dari segi cara, yaitu dengan melihat faktor sosial dan ekonomi orang yang memengaruhi terjadinya polusi. Cara ini menekankan pentingnya program dukungan untuk warga dan peningkatan ekonomi berkelanjutan untuk mencegah polusi. Selain itu, penelitian ini menjelajahi peran LSM dengan lebih luas dan dalam sebagai agen dukung bukan hanya sekadar penggerak kesadaran orang.

Dalam penelitian ini, untuk pertama kalinya, kami menggunakan data primer yang diperoleh dari berbagai pemangku kepentingan. Mari kita libatkan lebih banyak pihak seperti polisi, pemerintah, dunia usaha, dan pihak-pihak yang tinggal di Cianjur Selatan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai permasalahan hukum dan alam di wilayah tersebut. Studi tersebut menyarankan penggunaan perangkat seperti alat pemantauan udara dan air untuk observasi yang berkelanjutan dan tepat. Penelitian ini mengusulkan cara baru bagi masyarakat untuk membantu penegakan hukum dengan menjadi lebih terlibat dalam mengawasi dan melaporkan insiden pencemaran. Model ini mengakui kontribusi penting masyarakat dalam menjaga alam. Kawasan Cianjur Selatan patut mendapat perhatian kita karena memiliki rincian pencemaran yang berbeda-beda. masih belum banyak diketahui. Diharapkan dengan melihat hasil-hasil berbeda tersebut, penelitian ini dapat membantu menegakkan degradasi lingkungan, tidak hanya di wilayah selatan Siprus, namun juga di wilayah lain yang mempunyai permasalahan serupa.

A. Tantangan dalam Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan di Cianjur Selatan

Kejahatan pencemaran lingkungan di cianjur selatan merupakan hal yang besar. Perlindungan lingkungan belum sepenuhnya diapresiasi oleh masyarakat, dan hal ini merupakan masalah yang signifikan. Perspektif masyarakat terhadap polusi, termasuk pembuangan limbah rumah tangga dan industri yang tidak tepat, masih belum berubah. Masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang dampak jangka panjang dari polusi, seperti kerusakan ekosistem dan risiko kesehatan. Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum dan Dinas Lingkungan Hidup. Mereka kekurangan personel yang kompeten serta peralatan yang diperlukan untuk memantau dan menindak pelanggaran pencemaran. Hal ini diperparah oleh adanya pengaruh ekonomi dari pelaku industri yang sering kali memiliki hubungan erat dengan pejabat lokal. Ketergantungan pemerintah pada pelaku industri yang mencemari lingkungan melemahkan proses penegakan hukum, menyebabkan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggar sering tidak efektif.

Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah juga menjadi masalah utama. Dinas Lingkungan Hidup, Kepolisian, dan lembaga terkait lainnya sering kali bekerja secara terpisah tanpa sinergi yang baik, sehingga proses penanganan kasus pencemaran menjadi lambat. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus pencemaran juga sangat minim, baik karena kurangnya pemahaman tentang prosedur pelaporan maupun karena adanya ketakutan terhadap intimidasi dari pihak-pihak berpengaruh. Hal ini membuat banyak kasus pencemaran tidak tertangani secara efektif.

B. Solusi dan Pendekatan Baru dalam Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan

Penelitian ini menawarkan beberapa solusi dan pendekatan baru untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan di Cianjur Selatan. Salah satu solusi utama adalah peningkatan sinergi antara pemerintah, masyarakat, industri, dan LSM. Saat ini, koordinasi antara berbagai pihak masih terfragmentasi, sehingga penanganan pencemaran tidak berjalan secara optimal. Dengan adanya kerjasama yang lebih baik, peran masing-masing pihak akan

lebih jelas, sehingga respons terhadap pencemaran lingkungan bisa lebih cepat dan efektif. Pendekatan baru lainnya adalah menganalisis faktor sosial-ekonomi yang menjadi penyebab pencemaran. Masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam sering terpaksa melakukan aktivitas yang mencemari lingkungan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan. Selain itu, peran LSM sebagai agen advokasi dan pelapor kasus pencemaran juga harus lebih dimaksimalkan, termasuk dalam hal dukungan regulasi dan pendanaan.

Penggunaan teknologi dalam pengawasan pencemaran juga menjadi rekomendasi penting dalam penelitian ini. Sensor kualitas udara dan air berbasis teknologi dapat digunakan untuk memantau kondisi lingkungan secara real-time, sehingga tindakan penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Pendekatan ini berbeda dengan sistem pengawasan manual yang sering kali lambat dan kurang efektif. Selain itu, model partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum juga ditawarkan sebagai pendekatan baru. Masyarakat tidak hanya menjadi objek edukasi, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam pengawasan dan pelaporan kasus pencemaran. Dengan demikian, masyarakat menjadi bagian integral dari upaya menjaga lingkungan dan penegakan hukum. Model ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan di Cianjur Selatan, serta wilayah lainnya.

KESIMPULAN

Simpulan dari penelitian mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di wilayah Cianjur Selatan menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingginya tingkat pencemaran. Pembuangan limbah secara sembarangan oleh rumah tangga dan industri menjadi masalah serius karena minimnya edukasi tentang dampak lingkungan. Masyarakat belum sepenuhnya memahami risiko jangka panjang dari pencemaran terhadap kesehatan manusia dan kelangsungan ekosistem, yang menyebabkan perilaku pencemaran tetap berlanjut tanpa adanya perubahan signifikan.

Selain itu, kelemahan dalam penegakan hukum juga sangat terasa. Aparat penegak hukum dan Dinas Lingkungan Hidup setempat menghadapi keterbatasan sumber daya baik dari segi personel maupun alat-alat pendukung. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk memantau, menganalisis, dan menindak kasus-kasus pencemaran secara efektif. Tantangan semakin meningkat ketika terdapat kepentingan ekonomi yang kuat, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam industri pencemaran sering kali memiliki pengaruh terhadap pejabat lokal, sehingga proses hukum yang seharusnya berjalan adil sering terhambat.

Lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah juga menjadi kendala besar dalam penegakan hukum pencemaran lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup, Kepolisian, dan instansi terkait sering bekerja sendiri-sendiri tanpa adanya sinergi yang baik. Ditambah lagi, partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus pencemaran masih sangat rendah karena kurangnya pengetahuan dan adanya rasa takut akan intimidasi dari pihak-pihak berkuasa. Keadaan ini menyebabkan banyak kasus pencemaran tidak tertangani dengan baik dan sering terulang kembali.

Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini antara lain adalah peningkatan sinergi antara pemerintah, masyarakat, industri, dan LSM untuk menciptakan kerja sama yang lebih solid dalam penanganan pencemaran. Pemberdayaan ekonomi berkelanjutan juga ditekankan agar masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tidak terdorong melakukan aktivitas yang mencemari lingkungan. Teknologi pengawasan lingkungan berbasis real-time seperti sensor kualitas udara dan air diusulkan untuk mempercepat deteksi pencemaran. Selain itu, model partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam pengawasan dan pelaporan kasus pencemaran diharapkan dapat mendorong penegakan hukum yang lebih efektif serta meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan

masyarakat Cianjur Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Iskandar, A., *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan.* (Universitas Brawijaya Press, 2015)
- Kartini, A., & Wijaya, S., *Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan Di Wilayah Pedesaan* (Deepublish, 2017)
- Nugroho, A., Hadi, S., & Sari, D., 'Kendala Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia: Analisis Sumber Daya Manusia Dan Infrastruktur', *Jurnal Hukum Dan Lingkungan*, 1.5 (2018), pp. 22–25
- Prabowo, S., & Astuti, R., 'Kesenjangan Kebijakan Dan Praktik Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 14.3 (2021), pp. 45–60
- Rahardjo, Agus, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia* (Ghalila Indonesia, 2010)
- Sudarsono, E., *Hukum Lingkungan: Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* (Alumni, 2016)
- Wibisono, Y., *Hukum Lingkungan Dan Ekonomi: Pradigma Penegakan Hukum Berbasis Keberlanjutan* (Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Widianto, M., 'Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Lingkungan: Tantangan Dan Solusi', *Jurnal Sosial Dan Kebijakan*, 12.2 (2020), pp. 78–92